

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

7.1.1. Komunikasi kebijakan pelatihan kesehatan belum maksimal ditransmisikan, dijelaskan dan belum konsisten disampaikan kepada pelaksana hanya ada pada implementasi, sedangkan unsur-unsur ADDIE yang lain belum ada di komunikasikan.

7.1.2. Sumber Daya.

Sumber daya meliputi sumber daya instrumen, SDM, kewenangan dan dana. Sumber daya instrumen pelaksanaan kebijakan pelatihan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam mengimplementasikan kebijakan pelatihan kesehatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) widyaiswara secara kuantitatif sudah memadai secara kualitatif belum memadai dan secara kompetensi belum karena belum ada bidang apoteker dan dokter gigi. SDM pelaksana/staf secara kuantitas kurang memadai, secara kualitas kurang memadai, secara kompetensi tidak merata.

Kewenangan belum semua kewenangan diberikan kepada pelaksana kebijakan dan belum semua pelatihan mempunyai anggaran memadai.

7.1.3. Disposisi, sikap pelaksana kebijakan pelatihan kesehatan belum komitmen dengan petunjuk teknis hal ini karena belum ada pembagian tugas yang jelas dan kurangnya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan

motivasi berupa pemberian insentif.

- 7.1.4. Struktur birokrasi. Pelaksanaan kebijakan pelatihan sebagian belum sesuai dengan tata laksana/SOP yang ada. Sedangkan koordinasi antar lembaga belum maksimal hanya pada implementasi saja sedangkan terhadap unsur-unsur ADDIE lain belum ada.

## **7.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa hal disarankan:

### **7.2.1. Bagi Dinas Kesehatan**

1. Dinas Kesehatan sebaiknya meningkatkan komunikasi tentang kebijakan pelatihan dengan meningkatkan kemampuan pimpinan untuk mengkomunikasikan kepada inplementor tentang unsur-unsur ADDIE.
2. Dinas Kesehatan sebaiknya meningkatkan sumber daya BKOM-PELKES seperti SDM perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sebagaimana diamanatkan Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 yaitu setiap ASN harus mengikuti pelatihan minimal 80 jpl/tahun, institusi yang bersangkutan harus mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas SDMnya, Peraturan Bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang jabatan fungsional Widyaiswara bahwa seorang widyaiswara harus berpendidikan minimal S2 dan S3 untuk menduduki jabatan widyaiswara Utama dan setiap kenaikan jabatan terlebih dahulu harus mengikuti dan lulus diklat

penjenjangan yang dilaksanakan suwadana oleh LAN RI oleh sebab itu perlu dianggarkan dana untuk itu.

Memberi kewenangan kepada pelaksana kebijakan pelatihan kesehatan kepada BKOM-PELKES untuk melaksanakan seluruh kebijakan pelatihan kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pelatihan PNS bahwa istitusi yang menyelenggarakan pelatihan adalah institusi diklat yang sudah terakreditasi, Keputusan Mentri Kesehatan No 275 tahun 2003 tentang akreditasi Pelatihan Kesehatan dan Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Sumbar. Serta meningkatkan sumber daya anggaran yang memadai untuk implementasi kebijakan pelatihan setiap unsur-unsur ADDIE.

3. Dinas Kesehatan sebaiknya komitmen dengan peraturan-peraturan yang disebutkan diatas dan dapat meningkatkan motifasi implementor dengan pemberian insentif yang memadai.
4. Dinas kesehatan sebaiknya mefasilitasi koordinasi antar lembaga pelaksana program pelatihan kesehatan yaitu BKOM-PELKES dengan bidang-bidang dan dinas kesehatan kabupaten dan kota yang terkait dalam melaksanakan program pelatihan kesehatan.

#### **7.2.2. Bagi BKOM-PELKES**

1. Sebaiknya pimpinan mengkomunikasikan dengan jelas dan konsisten

kepada implementor tentang kebijakan program pelatihan sesuai dengan konsep ADDIE.

2. BKOM-PELKES sebaiknya meningkatkan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas, perlu advokasi oleh pimpinan bagian perencanaan anggaran Dinas Kesehatan agar dapat dianggarkan dana untuk peningkatan kualitas SDM widyaiswara dan staf.

Pada awal tahun duduk bersama dengan bidang-bidang, widyaiswara dalam membuat perencanaan program pelatihan yang akan diadakan. Serta memberi kewenangan kepada pelaksana untuk melaksanakan program pelatihan.

3. BKOM-PELKES sebaiknya komitmen dalam pelaksana kebijakan pelatihan kesehatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, membuat pembagian tugas pelaksana dengan jelas. Meningkatkan motifasi dengan memberikan insentif yang memadai kepada implementor.
4. BKOM-PELKES dalam pelaksanaan program pelatihan sebaiknya sesuai tata laksana/SOP yang sudah ada dan meningkatkan kordinasi dengan lembaga yang terkait.

